

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut jelas sekali bahwa peran nilai-nilai agama menjadi sangat penting dalam setiap proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Karena terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia tidak mungkin terbentuk tanpa peran dari agama. Menurut Malik Fajar (2009), yang dikutip oleh Yunus Hasyim Syam, Pendidikan adalah masalah yang tidak pernah tuntas untuk dibicarakan, karena itu menyangkut persoalan manusia dalam rangka memberi makna dan arah normal kepada eksistensi fitrinya.

Sistem pendidikan nasional sebenarnya tidak menominasi system pendidikan Islam Indonesia, dan makna manusia seutuhnya dalam tujuan pendidikan nasional melalui beragam jenis, jenjang, sifat dan bentuk pendidikan/pelatihan sebagai proses kemanusiaan yang bertindak dalam logika berpikir sebagai makhluk yang berakal dan berbudi, juga sebagai proses pemanusiaan yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara penuh pemegang mandat *ilahiah* yang merujuk pada hubungan dengan Tuhannya. berikut perilaku yang dikehendaki di dalamnya dan mandat kultural yang mengandung makna sebagai insan berbudaya.

Indonesia, walaupun secara tegas dinyatakan bahwa bukan Negara agama dan bukan pula Negara sekuler, tetapi Negara Pancasila. Negara Pancasila, dapat dikatakan bahwa Indonesia mengambil jalan tengah (*middle path*) antara Negara agama dan Negara sekuler. Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan Negara sekuler yang memisahkan agama dan Negara, dan bukan Negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu. Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Secara filosofis, pandangan hidup bangsa tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka pendidikan Islam Indonesia seharusnya mampu menjadi sub sistem pendidikan nasional. Terlebih sejak dikeluarkannya UUSPN Nomor 2 Tahun 1989, yang berwawasan masa depan dan diintrodusirkannya kebijakan *link and match* dalam pendidikan, merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi sistem dan lembaga pendidikan Islam, khususnya bagi sarjana dan cendekiawan muslim untuk merumuskan rancangan sekaligus memelopori bangunan pendidikan Islam yang berwawasan masa depan, sesuai dengan misi dasar kata *Al-Islam*, adalah mengislamkan yang berarti menjalankan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika keislaman.

Selanjutnya jika dicermati posisi Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas 2003, diketahui sebagai berikut;

1. Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
2. Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional adalah: Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar

peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.

3. Pasal 4 ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
4. Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh guru/pendidik yang seagama. Tiap sekolah wajib memberikan ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif.
5. Pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
6. Pasal 17 ayat (2) Pendidikan dasar terbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pasal 18 ayat (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pasal 28 ayat (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Salah satu jenis pendidikan nasional adalah pendidikan agama. Setingkat taman kanak-kanak (TK) dinamakan raudatul athfal (RA), sekolah dasar (SD) dinamakan madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dinamakan madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA) dinamakan madrasah Aliyah (MA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dinamakan madrasah aliyah kejuruan (MAK)
9. Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari

pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Dalam hal ini pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah/madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan Al-Qur'an (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah).

10. Pasal 36 ayat (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman dan takwa, Peningkatan akhlak mulia, dan seterusnya.
11. Pasal 37 (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan; dan seterusnya... (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.
12. Pasal 55 ayat (1) mengenai Pendidikan Berbasis Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal-pasal tersebut merupakan penempatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.

Jika dicermati dari tiap Pasal UU Sisdiknas 2003 di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih menfokuskan diri dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.

Meskipun pendidikan agama mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ketakwaan kepada Tuhan realitas, pendidikan agama masih dipandang pendidikan nomor dua oleh sebagian masyarakat, hal ini terlihat masih rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra/putri mereka ke Lembaga-lembaga pendidikan agama, seperti madrasah maupun pesantren. Lembaga pendidikan agama menjadi prioritas kedua setelah sekolah. Salah satu alasannya adalah kualitas lembaga pendidikan agama lebih rendah di bandingkan sekolah yang sifatnya umum. Maka Lembaga Pendidikan Islam yang memiliki landasan kuat dari agama dan mendapat jaminan dari undang-undang negara harus melakukan perbaikan dan peningkatan standar mutu pendidikan agar dapat menjadi sebuah lembaga layanan publik yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Melihat fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini. Pengembangan pribadi tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya, banyak terjadi pelanggaran norma kemanusiaan yang dilakukan oleh peserta didik. Kebebasan yang mereka rasakan tidak dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dalam pengembangan dirinya dan bagi orang lain, melainkan sebaliknya mereka gunakan untuk perbuatan yang tidak terpuji.

Kesalahan pendidikan yang ada sekarang ini, telah menciptakan masyarakat yang konsumetris materialistis dan individualistis. Konsumentris dianggap sebagai sebuah budaya yang baik dan bergengsi. Begitu pula, *materialisme* dan *individualism* dijadikan berhala yang patut dan pantas disembah. Fenomena semacam itu, menurut Abdullah, “Merupakan hasil dari kesalahan pendidikan yang tidak begitu peduli terhadap nilai-nilai agama. Pendidikan

nampaknya belum mampu menjawab secara tuntas problem akut umat yang menyangkut dari output pendidikan itu sendiri yaitu berkakhlak mulia.

Shalih juga menjelaskan bahwa “Pendidikan Islam masih berkuat kepada pengadopsian sistem pendidikan dari barat, sehingga hal tersebut mengakibatkan pendidikan yang berorientasi pada akhlak dan nilai-nilai keagamaan kurang mendapat perhatian. Padahal di sinilah pendidikan dipertaruhkan untuk *to be or not to be* atau melakukan atau tidak melakukan (Shalih, 1991). Lembaga pendidikan Islam berkualitas, seperti lembaga pendidikan umum, dirasakan oleh sebagian masyarakat memang cukup terbatas. Ini tidak lain, ada kaitan dengan masa lalu lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan kelas dua. Bahkan bagi sebagian masyarakat, singkatan MTs sering diplesetkan menjadi “Madrasah Tengah Sawah”. Ini sedikit banyak ada korelasinya dengan masa lalu lembaga pendidikan Islam. Pasca kemerdekaan, pendidikan Islam di Indonesia dalam kategori marjinal.

Masalah pendidikan yang dihadapi di abad 21 ini memang berbeda dengan masalah pendidikan masa-masa silam. Orietasi masa kini, program pembelajaran harus lebih diproyeksikan ke masa depan daripada masa kini atau masa lampau. Meskipun masa lampau dan masa kini tetap dijadikan khazanah kekayaan empiris yang amat berharga bagi loncatan ke masa depan. Sehingga, nostalgia ke masa keemasan dunia Islam masa lampau (abad ke-7 s/d 14) tidak perlu lagi mengobsesi pemikiran kita. Lebih-lebih dalam menghadapi pergeseran nilai-nilai kultural yang transisional dari dunia pendidikan, yang belum menemukan pemukiman mapan.

Maka, pendidikan Islam dituntut untuk menerapkan pendekatan dan orietasi baru yang relevan dengan tuntutan zaman, justru karena kependidikan Islam membawakan prinsip dan nilai-nilai absolutisme yang bersifat mengarahkan trends perubahan sosiokultural.

Hasil survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (2017) terhadap 4.500 pelajar SMP dan SMA di 12 kota besar Indonesia menunjukkan hasil yang cukup mencengangkan. Sebanyak 97 persen responden mengaku telah mengakses situs berkonten pornografi dan juga menonton video porno melalui internet. Selain itu, KPAI juga menemukan ada 92,7 persen

responden melakukan kissing dan oral sex, 61 persen pelajar SMP melakukan hubungan di luar nikah, dan 21,2 persen siswi SMU melakukan aborsi.

Data di atas menunjukkan bahwa peserta didik bukan menunjukkan akhlak yang baik. Jika fenomenanya demikian maka sudah seharusnya pendidikan agama bukan hanya kognitif, melainkan harus mengalami perubahan dari pengetahuan menjadi sebuah nilai dan makna yang dimasukan ke dalam berbagai agenda, baik personel lembaga pendidikannya maupun media yang menjadikan peserta didik semakin tersentuh jiwanya. Sehingga yang muncul dalam pembelajaran itu bukan menghafal teks-teks normatif, melainkan bagaimana menyikapi era modern dengan nilai-nilai keagamaan dengan teks itu. Sebenarnya, keseimbangan pribadi seseorang sebagian besar ditentukan oleh pendidikan yang diperolehnya. Dari konsep itulah patut direnungkan banyak hal, seperti sejauh mana pendidikan di sekolah mampu memanfaatkan kegiatan pembelajaran untuk membentuk akhlak karimah peserta didik.

Penyebab peserta didik tidak taat dan patuh kepada agamanya, dugaan sementara penyebab terjadinya masalah tersebut dilatarbelakangi oleh: Keluarga, Sekolah/Guru/Lingkungan pergaulan di mana peserta didik itu berdomisili. Kendati demikian maka tidak berlebihan kiranya kepada para kepala sekolah, guru PAI, dan praktisi, untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan akhlak peserta didik.

Mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan fenomena di lapangan terkait masalah akhlak tersebut, maka penyelenggara pendidikan bermutu mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu diperlukan usaha-usaha perbaikan yang sistematis dan berkesinambungan, usaha-usaha itu berkenaan dengan kurikulum, sarana dan prasarana, proses belajar mengajar, manajemen supervisi dan evaluasi, kesiswaan, ketenagaan, yang mana terkait dengan pembinaan SDM guru yang dianggap sebagai agen utama inovasi dan perubahan yang sekaligus sebagai pembuat keputusan. (Wiles & Bondi, 1993) mengemukakan: “ *principles are considered the major agents of innovation and change, as decision maker.*” bahwa pada intinya guru bertugas untuk mempelajari dan mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi

sekolah serta berusaha untuk memecahkannya dan mengambil keputusan yang terbaik. adapun pengembangan profesionalisme guru untuk menghasilkan mutu pendidikan secara optimal (berkualitas) memusatkan perhatian pada: (1) belajar menjadi profesional secara terus menerus dikaitkan dengan standar-standar baru terhadap kurikulum, (2) pengembangan profesional dikaitkan dengan pekerjaan guru yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang paling besar dalam proses pembelajaran. konsep pengembangan guru dimaksud dapat ditindak lanjuti terhadap keberadaan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta Utara.

Menurut asumsi peneliti guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta Utara pada umumnya masih kurang memahami peran tugas dan fungsinya sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan, termasuk dalam memenej pembelajaran PAI nya. akibatnya kualitas hasil dan sikap perilaku sehari-hari anak didik kita masih butuh perhatian serius dari semua pihak lebih-lebih dari guru agama islam.

Guru harus memahami manajemen terlebih dahulu untuk memahami materi perencanaan aktivitas belajar mengajar, karena perencanaan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Konsep manajemen yang digagas dalam penelitian ini dengan pendekatan sistematis dan praktis, sebagaimana prinsip-prinsip dasar manajemen. Menurut (Terry, 1958) dalam bukunya "*principles of management*" yang mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses menetapkan tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan melibatkan identifikasi masalah, pengembangan tujuan, pengembangan strategi, dan penetapan langkah-langkah tindakan.

Terry juga menekankan pentingnya pembentukan struktur organisasi yang efisien dan efektif. Organisasi melibatkan pengelompokkan tugas-tugas yang berhubungan menjadi unit-unit kerja yang koheren, penugasan wewenang dan tanggung jawab, serta pembentukan hubungan-hubungan hierarki dan lateral.

Pengarahan melibatkan proses mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, pengendalian melibatkan pengawasan pelaksanaan rencana dan tindakan korektif jika diperlukan.

Konsep manajemen tersebut jika diterjemahkan dalam kegiatan pembelajaran, maka manajemen pembelajaran diartikan sebagai usaha maupun tindakan guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dilaksanakan sedemikian rupa untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan program sekolah dan juga pembelajaran. Artinya manajemen pembelajaran di sekolah merupakan pengelolaan pada beberapa unit pekerjaan oleh personel yang diberi wewenang untuk itu muaranya pada suksesnya program pembelajaran. Dengan demikian keefektifan manajemen pembelajaran dapat dicapai jika fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan pengevaluasian dapat diimplementasikan dengan baik dan benar dalam program pembelajaran.

Manajemen pembelajaran mengacu pada rangkaian strategi, praktik, dan prinsip yang digunakan oleh guru dan kepala sekolah untuk mengelola lingkungan pembelajaran yang efektif di kelas dan di seluruh sekolah. Konsep tersebut dipertegas oleh Robert J. Marzano (2011) dalam bukunya "*Classroom Management That Works: Research-Based Strategies for Every Teacher*" yang mengemukakan bahwa manajemen pembelajaran sebagai "proses dan strategi yang guru gunakan untuk memastikan bahwa perilaku siswa mendukung pembelajaran". Teori ini melibatkan penggunaan aturan, prosedur, dan strategi untuk menciptakan lingkungan kelas yang terstruktur dan kondusif bagi pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran tenaga kependidikan merupakan suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai tenaga kependidikan dan guru, setiap guru dalam melaksanakan tugas mengajar harus memiliki kemampuan-kemampuan profesional dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran. Dengan kemampuan itu guru dapat melakukan perannya sesuai dengan standar kinerja guru sebagai tenaga profesional. Standar kinerja guru dalam pendidikan dan pengajaran meliputi: 1) Memberi pelajaran tepat waktu 2) Memberi bimbingan belajar kepada peserta didik sesuai jadwal 3) Membuat bahan

ajar selalu *up to date* mengacu pada kurikulum 4) Menyusun dan mengembangkan bahan ujian formatif dan sumatif 5) Membicarakan hasil ujian dengan peserta didik sebagai umpan balik yang positif 6) Memberikan pelayanan belajar secara efektif 7) Menciptakan fasilitas bagi terlaksananya diskusi kelas, maupun kegiatan belajar siswa 8) Dapat mencakup materi pelajaran sesuai rencana dan silabus pelajaran 9) Menggunakan berbagai media belajar untuk membangkitkan minat belajar peserta didik 10) Membimbing peserta didik dalam kegiatan pembelajaran (Sagala, 2010).

Akhlak adalah bentuk masdar dari kata *akhlaq, yukhliq, ikhlaqon* yang memiliki arti perangai, kelakuan, Tabiat, atau watak dasar, kebiasaan atau kelaziman peradaban yang baik. Kata *khuluq* juga ada yang menyamakannya dengan kesusilaan, sopan santun serta gambaran sifat batin dan lahiriyah manusia. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa Akhlak adalah hayat atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, ia dinamakan akhlak yang baik, tetapi jika ia menimbulkan perbuatan yang jahat, maka ia dinamakan akhlak terburuk. Akhlak terpuji seringkali disebut dengan akhlak karimah. *akhlaqul karimah* adalah segala budi pekerti baik yang ditimbulkan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan yang mana sifat itu menjadi budi pekerti yang utama dan dapat meningkatkan harkat dan martabat siswa.

Proses pembentukan dan peningkatan akhlak karimah dalam pandangan pengantar studi akhlak terdiri atas tiga dasar pembentukan, yaitu pembentukan kerohanian yang luhur, pembentukan kebiasaan, pembentukan minat dan sikap. Di sisi lain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan pembiasaan dan sikap siswa. Kendati demikian maka pembelajaran PAI apabila dikelola dengan manajemen yang baik dapat meningkatkan akhlak karimah peserta didik.

Sekolah dapat menjadi wahana yang efektif dalam meningkatkan akhlak karimah peserta didik, dengan menerapkan manajemen pembelajaran PAI yang

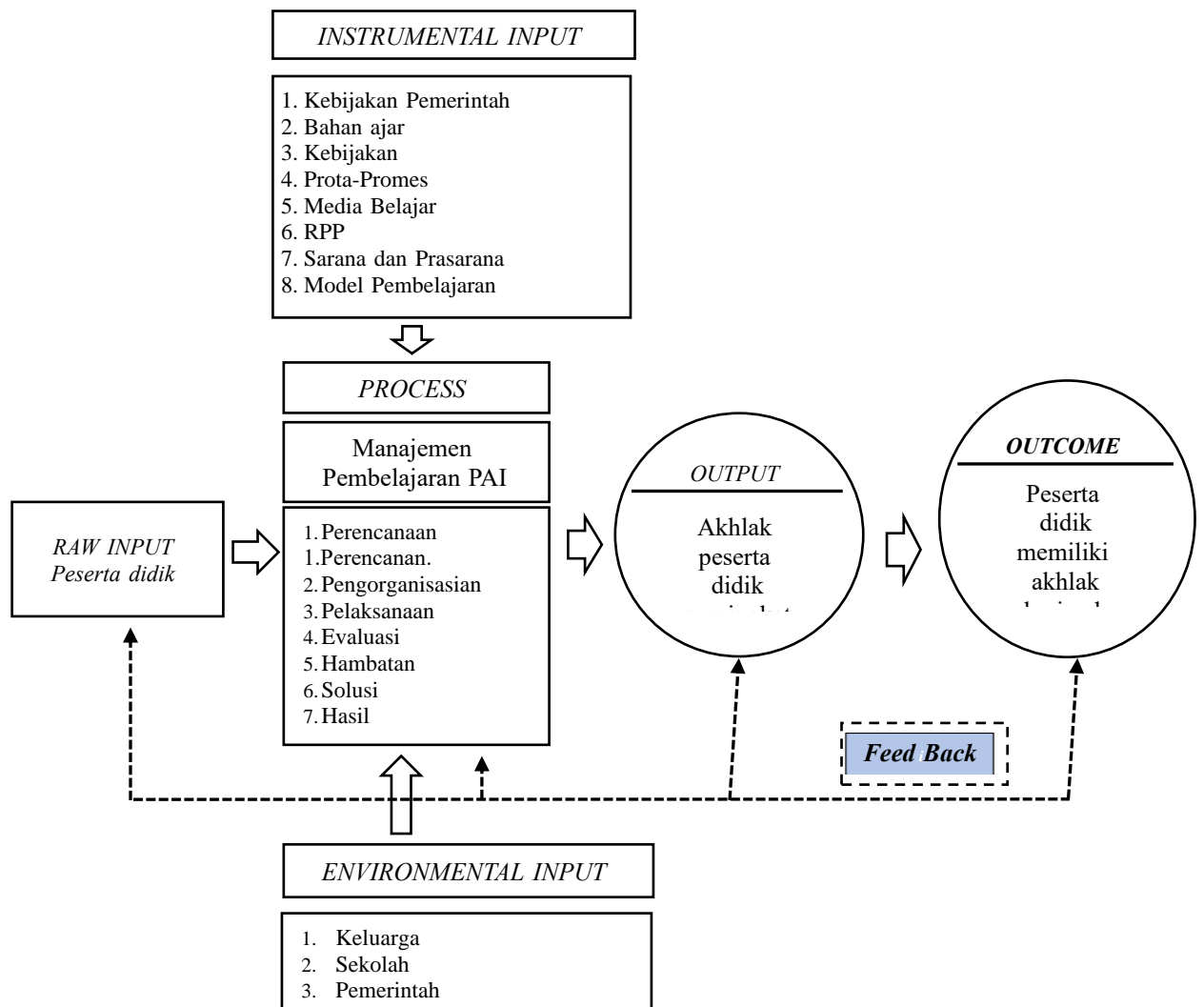
efektif, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Akhlak peserta didik sebagai bentuk dari interaksi proses pembelajaran di sekolah. Dalam proses pembelajaran guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, pengajaran. Ketika seorang guru merancang pengajaran, maka guru harus sudah mempertimbangkan pertanyaan apakah tersedia kelengkapan yang cukup untuk digunakan siswa dalam program pembelajaran harus dapat mengenali kebutuhan-kebutuhan dan mewaspadai kendala-kendala serta batasan-batasan yang mungkin dijumpai dalam realitas.

Berdasarkan fakta yang ada tersebut terjadinya kesenjangan antara manajemen pembelajaran PAI dan akhlak siswa yang rendah, seharusnya ketika manajemen pembelajaran PAI sudah dilaksanakan dengan baik dapat menghasilkan pertumbuhan akhlak siswa yang baik akan tetapi faktanya siswa belum sepenuhnya menunjukkan akhlak yang baik, maka peneliti akan meneliti manajemen pembelajaran PAI dalam meningkatkan akhlak peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta Utara.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

### **1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut;



**Gambar 1.1 Perumusan Masalah**

Berdasarkan bagan di atas, masalah dirumuskan sebagai berikut,

- Raw input* adalah peserta didik yang akan ditumbuhkan akhlak mulia melalui manajemen pembelajaran PAI.
- Proses* terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses manajemen akan membuat sebuah proses pembelajaran PAI untuk menumbuhkan akhlak karimah peserta didik SMP. Tahapan ini sangat penting dalam manajemen pendidikan karena memastikan bahwa setiap langkah pembelajaran dilakukan dengan sistematis dan terukur. Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat SMP, proses manajemen ini akan mencakup beberapa elemen kunci untuk

menumbuhkan akhlak karimah pada peserta didik. Langkah pertama adalah:

- 1) Perencanaan, di mana tujuan dan sasaran pembelajaran PAI ditetapkan. Perencanaan mencakup penentuan materi ajar yang relevan dan metode pengajaran yang efektif. Pada tahap ini, guru dan manajemen sekolah bekerja sama untuk menyusun rencana pelajaran yang tidak hanya memenuhi standar kurikulum tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai akhlak karimah. Strategi pengajaran, seperti penggunaan cerita moral, diskusi kelompok, dan kegiatan praktis, direncanakan untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya memiliki akhlak yang baik.
- 2) Pengorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya, baik itu tenaga pengajar, materi pembelajaran, maupun fasilitas pendukung. Di sini, kepala sekolah dan tim manajemen memastikan bahwa guru PAI memiliki semua yang mereka butuhkan untuk mengajar dengan efektif. Ini juga termasuk pengaturan jadwal yang memungkinkan pembelajaran PAI dilaksanakan secara teratur dan konsisten. Selain itu, pengorganisasian juga berarti melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan akhlak karimah, seperti program mentoring, kegiatan sosial, dan layanan masyarakat.
- 3) Tahap pelaksanaan adalah saat rencana yang telah dibuat dieksekusi di dalam kelas. Guru PAI memainkan peran utama dalam mengimplementasikan metode pengajaran yang telah direncanakan. Dalam kelas, mereka menggunakan pendekatan yang telah disiapkan untuk mengajarkan nilai-nilai akhlak karimah, seperti melalui diskusi kasus moral, permainan peran, dan refleksi pribadi. Guru juga berinteraksi secara langsung dengan siswa untuk memantau perkembangan mereka dan memberikan bimbingan serta dukungan yang diperlukan. Pelaksanaan ini tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas melalui kegiatan-kegiatan yang membangun karakter dan nilai moral siswa.

- 4) Tahap terakhir adalah evaluasi, di mana efektivitas pembelajaran PAI diukur dan dianalisis. Evaluasi mencakup penilaian terhadap pemahaman siswa tentang materi ajar serta perkembangan akhlak mereka. Guru menggunakan berbagai alat evaluasi, seperti tes, kuis, observasi, dan penilaian proyek, untuk mengukur hasil pembelajaran. Data yang dikumpulkan dari evaluasi ini kemudian dianalisis untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi juga melibatkan umpan balik dari siswa dan orang tua untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas program pembelajaran. Dengan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur, proses manajemen dalam pembelajaran PAI di SMP dapat membantu menumbuhkan akhlak karimah pada peserta didik secara efektif. Ini memastikan bahwa pendidikan agama tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoretis tetapi juga pada pembentukan karakter yang mulia.
- c. *Output* adalah hasil manajemen pembelajaran PAI dalam menumbuhkan akhlak karimah peserta didik SMP yaitu meningkatnya akhlak mulia peserta didik.
  - d. *Outcome* adalah peserta didik yang dihasilkan dari meningkatnya akhlak mulia peserta didik melalui program manajemen pembelajaran PAI dalam menumbuhkan akhlak mulia peserta didik SMP.
  - e. *Instrumental input* adalah sumber daya manusia dari dalam yang akan melaksanakan manajemen pembelajaran PAI dalam menumbuhkan akhlak mulia peserta didik SMP yang terdiri dari kepala sekolah, guru, kurikulum, kesiswaan, komite, sarana dan prasarana.
  - f. *Environmental Input* adalah sumber daya manusia dari luar yang akan membantu manajemen pembelajaran PAI dalam menumbuhkan akhlak mulia peserta didik SMP yang terdiri dari peraturan, kebijakan, Dinas Pendidikan, dan masyarakat.
  - g. *Feed Back* adalah umpan balik yang diharapkan dalam bentuk hasil dari suatu proses kegiatan. Feedback bertujuan untuk memperbaiki atau

meningkatkan proses atau hasil dari suatu kegiatan. Ini bisa melibatkan perubahan pada metode, strategi, atau sumber daya yang digunakan. Feedback bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses atau hasil dari suatu kegiatan. Ini bisa melibatkan perubahan pada metode, strategi, atau sumber daya yang digunakan

## **2. Pembatasan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran PAI untuk menumbuhkan akhlak karimah peserta didik; meliputi:
  - 1) Silabus (standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator).
  - 2) Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
  - 3) Pendekatan dan metode belajar.
  - 4) Langkah-langkah kegiatan pembelajaran.
  - 5) Media dan sumber pembelajaran.
- b. Pengorganisasian pembelajaran PAI untuk menumbuhkan akhlak karimah peserta didik;
  - 1) Penetapan rombongan belajar.
  - 2) Penetapan kelompok belajar.
  - 3) Beban belajar dalam struktur kurikulum.
  - 4) Muatan mata pelajaran dan area belajar.
  - 5) Pengaturan waktu belajar.
  - 6) Proses pembelajaran.
  - 7) Pemilihan model pembelajaran.
- c. Pelaksanaan pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah peserta didik, meliputi:
  - 1) Materi pembuka
  - 2) Riview pembelajaran sebelumnya
  - 3) Penjelasan materi
  - 4) Diskusi kelompok

- d. Pengawasan pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah peserta didik meliputi:
  - 1) Kehadiran
  - 2) Tugas individu.
  - 3) Tugas kelompok.
  - 4) PTS.
  - 5) PAS.
- e. Masalah/hambatan yang terjadi dalam proses implementasi pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah meliputi:
  - 1) Sarana dan prasarana
  - 2) Anggaran
- f. Solusi yang dilakukan dalam implementasi pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah dengan indikatornya adalah sebagai berikut:
  - 1) Solusi faktor penghambat internal
  - 2) Solusi faktor penghambat eksternal
- g. Dampak pembelajaran PAI terhadap peningkatan akhlak karimah, dengan indikator sebagai berikut:
  - 1) Akhlak terhadap Allah
  - 2) Akhlak terhadap guru
  - 3) Akhlak terhadap sesama
  - 4) Akhlak terhadap orang tua

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen pembelajaran PAI dalam meningkatkan akhlak karimah peserta didik SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta.

#### **b. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui gambaran tentang:

- 1) Perencanaan pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah Peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta Utara;
- 2) Pengorganisasian pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah Peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta Utara;
- 3) Pelaksanaan pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah Peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta Utara;
- 4) Pengawasan pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah Peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta Utara;
- 5) Masalah/hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta Utara;
- 6) Solusi terhadap masalah dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta Utara;
- 7) Dampak pembelajaran PAI terhadap peningkatan akhlak karimah peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta Utara.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bersifat teoretis maupun praktis dari penelitian ini sebagai berikut;

### **a. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen pendidikan, khususnya dalam konteks pengelolaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk membentuk karakter akhlak karimah peserta didik. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya terkait pengelolaan pembelajaran berbasis nilai-nilai agama dan pembentukan akhlak peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian teoretis tentang peran Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan akhlak karimah, yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia.

## b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi;

### 1) Kepala Sekolah

Kepala Sekolah dapat memahami lebih baik bagaimana manajemen pembelajaran PAI dioptimalkan untuk mendukung pengembangan akhlak karimah. Hal ini memungkinkan kepala sekolah untuk menetapkan standar pembelajaran yang lebih tinggi dan memastikan bahwa kurikulum PAI diimplementasikan secara efektif.

### 2) Guru

Para Guru PAI diharapkan mampu untuk merancang, mengimplementasikan serta mengevaluasi pembelajaran PAI secara inovatif, kreatif dan efektif. Selain itu, diharapkan juga terdapat peningkatan akhlak peserta didik.

### 3) Penelitian Selanjutnya

Menjadi bahan bandingan dan rujukan teoritis dalam penelitian lebih lanjut bagi peminat maupun praktisi pendidikan Islam serta manajemen pembelajaran pendidikan Agama Islam.

### 4) Dinas Pendidikan

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Dinas Pendidikan dalam menyusun kebijakan yang mendukung pengelolaan pembelajaran PAI secara efektif untuk membentuk karakter akhlak karimah peserta didik. Hasil penelitian dapat membantu Dinas Pendidikan mengevaluasi efektivitas program pendidikan karakter, khususnya dalam konteks penerapan nilai-nilai agama Islam di sekolah. Memberikan masukan terkait strategi manajemen pembelajaran PAI yang dapat meningkatkan mutu pendidikan secara holistik, meliputi aspek akademik dan moral peserta didik.

**D. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta?
2. Bagaimana pengorganisasian pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta?
3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta?
4. Bagaimana evaluasi pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta?
5. Apa masalah/hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta?
6. Apa solusi terhadap masalah dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak karimah peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta?
7. Apa hasil/dampak pembelajaran PAI terhadap peningkatan akhlak karimah peserta didik di SMPN 129 dan SMPN 95 Jakarta?